



DATANGI POLDA BAWA BARANG BUKTI KPU Laporkan Partai Republiku

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, secara resmi melaporkan DPP Partai Republiku Indonesia ke Polda DIY Sabtu (23/8), atas dugaan pemalsuan dokumen. Dalam laporannya, KPU kota melalui ketuanya Miftakhul Alfin, didampingi anggota Nasrullah, Rohmat Munadzir dan Aan Korniasih, juga menyertakan sejumlah bukti pendukung, seperti *foto copy* surat keterangan dari Kecamatan Danurejan, yang diduga telah dipalsukan.

Di samping juga, menyerahkan surat keterangan dari Camat Danurejan Harjo Yudo SH, yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili, seperti yang dibuat dan dikirim partai Republiku kepada KPU dalam rangka verifikasi beberapa waktu lalu.

Dalam suratnya tertanggal 22 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Walikota Yogyakarta itu, Camat Harjo Yudo juga menyatakan, bahwa kop surat dan stempel instansi yang digunakan Partai Republiku adalah palsu.

Kepada wartawan Nasrullah mengatakan, meski-

pun partai tersebut tidak masuk dalam verifikasi, namun laporan itu sebagai bukti bahwa KPU Kota dapat berbuat sesuatu.

Dijelaskan, indikasi pemalsuan itu muncul, setelah Partai Republiku menyerahkan surat keterangan domisili kantor partai, yang

dikeluarkan Camat Danurejan. Namun saat dilakukan pengecekan, belakangan diketahui nama serta tandatangan camat bukanlah pejabat yang berwenang. "Kita berharap agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sesuai prosedur yang berlaku," pungkasnya.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Hj Anni Pudjiastuti dikonfirmasi *KR* mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. "Laporan itu akan kami tindaklanjuti dan saat ini sedang ditangani Ditreskrim," ungkapnya.

714 Bacaleg DIY

Secara terpisah, KPU DIY terus melakukan verifikasi terhadap calon anggota legislatif pada DPRD DIY. Dari surat daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) terdapat 714 bakal calon legislatif (Bacaleg).

Menurut Kabag Penyelenggaraan Sekretariat KPU DIY, Drs Nanang Usli, jumlah Bacaleg tersebut termasuk dari DCS tiga partai yang berpengurus ganda. Di antaranya, PKB, PKNUI dan Partai Karya Perjuangan.

Untuk memastikan siapa yang diambil, menurut Nanang, pihaknya akan mengi-

rimkan surat ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) ketiga partai tersebut. "Senin ini kita kirim. Kita minta mana kepengurusan yang sah. Selain itu juga minta klarifikasi ke KPU Pusat," ujarnya.

Sekretaris DPW PKB DIY pimpinan Agus Wiyarto meminta kepada KPU DIY untuk hati-hati dalam menentukan sikap kepengurusan ganda.

"KPU hendaknya juga mencermati AD/ART partai. Jangan sampai keputusan yang diambil justru berbuntut secara hukum," ujarnya.

(*6/Jon)-f JT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005